

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pesisir barat bagian tengah pulau Sumatera dengan Padang sebagai ibu kotanya. Provinsi Sumatera Barat berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu dan Samudera Indonesia. Provinsi dengan 12 kabupaten dan 7 kota ini memiliki wilayah seluas 42.297,30 km² dan jumlah penduduk 4,90 juta jiwa (BPS, 2017). Dengan jumlah penduduk yang relatif cukup besar ini sangat dibutuhkan adanya infrastruktur jalan yang baik sebagai prasarana transportasi untuk memenuhi kebutuhan penduduk.

Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera sebagaimana salah satu tujuan dari pembangunan Nasional Indonesia, Pemerintah Provinsi telah merencanakan prioritas pembangunan beberapa ruas jalan provinsi yang tertuang dalam Dokumen Master Plan Jalan Provinsi Tahun 2016-2026 Provinsi Sumatera Barat. Pembangunan infrastruktur jalan ini sangat penting, karena dapat mendongkrak kehidupan perekonomian yang akan berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Dari dokumen Master Plan Jalan Provinsi diatas dinyatakan bahwa ada 10 ruas jalan Provinsi yang diprioritaskan pembangunannya, yaitu seperti terlihat dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Ruas Jalan Prioritas Provinsi

No	No Ruas	Nama Ruas
1	06.056.3	Abai Sangir – Sei. Dareh
2	06.073	Pasar Baru – Alahan Panjang
3	06.076	Pangkalan Kt. Baru – Sialang -Gelugur
4	06.082	Alahan Panjang – Kiliran Jao

No	No Ruas	Nama Ruas
5	06.083	Teluk Kabung – Mandeh - Tarusan
6	06.091	Simp. Napal – Bukit Bual – Tanjung Ampalu
7	06.096	Lubuk Sikaping - Talu
8	06.097	Bungo Tanjung – Teluk Tapang
9	06.098	Teluk Bayur – Nipah - Purus
10	06.099	Purus – Bandara Internasional Minang

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat (2016)

Pada dasarnya semua ruas jalan yang telah direncanakan di atas tentu akan dibangun. Namun, mengingat keterbatasan anggaran yang ada untuk pembangunan jalan baru, maka dibutuhkan urutan prioritas ruas jalan agar pelaksanaan pembangunan jalan dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, sangat diperlukan adanya analisa untuk mendapatkan urutan prioritas ruas jalan bagi pelaksanaan pembangunan jalan tersebut.

Di Dinas PUPR sendiri selama ini telah dilakukan pembangunan jalan baru berdasarkan urutan prioritas dengan memperhatikan data IIRMS dan mempertimbangkan aspek kepentingan, apakah itu oleh masyarakat sendiri ataukah dari kebijakan politis tertentu yang menginginkan adanya pekerjaan pembangunan jalan.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menentukan kriteria yang digunakan dalam penentuan prioritas pelaksanaan pembangunan jalan baru Provinsi Sumatera Barat, melalui tahapan studi pendahuluan dan wawancara pada pihak penyelenggara jalan.
2. Menentukan urutan kriteria yang digunakan pada penentuan prioritas pelaksanaan pembangunan jalan baru Provinsi

Sumatera Barat, melalui tahapan pengumpulan data primer yang kemudian dianalisis menggunakan metode Kriteria Prioritas.

3. Menentukan urutan prioritas ruas jalan yang membutuhkan penanganan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat, melalui tahapan pengumpulan data sekunder dan penggabungan hasil analisa data primer dengan data sekunder yang dianalisis menggunakan metoda Matrik Prioritas.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah hasilnya dapat dijadikan sebagai acuan/ pedoman dan bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat dalam menentukan kebijakan teknis.

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi dengan :

1. Objek penelitian adalah 10 ruas jalan provinsi yang terdapat pada Dokumen Master Plan Jalan Provinsi Tahun 2016-2026 Provinsi Sumatera Barat.
2. Data yang digunakan berasal dari Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat antara lain data kondisi fisik jalan provinsi, data pemanfaatan lahan, data rute jalan, data jumlah penduduk, data anggaran jalan, dan data tujuan pembangunan jalan.
3. Metoda yang digunakan adalah kombinasi metoda Kriteria Prioritas untuk menentukan urutan kriteria yang digunakan dan metoda Matrik Prioritas untuk menentukan urutan prioritas ruas jalan yang membutuhkan penanganan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.
4. Responden dalam pelaksanaan wawancara/ kuisisioner penelitian ini adalah para pejabat dan staf ahli terkait pembangunan jalan dari dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat selaku penyelenggara jalan.